

ABSTRACT

This paper describes multicultural education concept as an alternative solution to reduce racial antagonism our country. According to the writer, multicultural education is educate in which values cultural pluralism or education model that aim's promote the transformation of the educational process to reflect the ideals of democracy in a pluralistic society and structural equality within the larger society. This concept affirms that schools should be oriented toward the cultural enrichment of all children and recognizes cultural diversity as a fact of life in Indonesia that should be preserved and extended. http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational Theory/Contents/44_1_McCarthy.asp-fn19#fn19 Thus, one of its important goals is to help all students to acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate, and communicate with peoples from diverse groups in order to create a civic and moral community that works for the common good.

If we break down, there are three essential goals of multicultural education. The first, to enhance sensitivity to and understanding of others, including cultural groups in Indonesia and other nations. The second, to enhance the ability to make decisions and take effective action based on a multicultural analysis and synthesis. The third, to enhance understanding of the process of stereotyping, a low degree of stereotypical thinking, and pride in self and respect for all peoples

Key Word: Multikulturalisme, Paradigma, Internalisasi.

Telaah Konsep Multikulturalisme Dan Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan

Zubaedi

Pendahuluan

Memperbincangkan konsep pendidikan multikultural di tengah kehidupan masyarakat yang masih rawan terseret dalam konflik bernuansa SARA seperti sekarang tentunya sangat signifikan.¹ Apalagi sejak Presiden Megawati Soekarnoputri menghimbau Departemen Agama agar mengembangkan pola pendidikan agama yang berwawasan multikultural (Oktober 2001), hingga kini belum muncul respon sungguh-sungguh untuk menindaklanjutinya.² Wacana pendidikan multi-kulturalisme memang sempat menghangat di mass media dan menjadi bahan diskusi di sejumlah forum, tapi sayangnya tidak diikuti

¹ Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan termasuk mengubah nilai-nilai dasar pendidikan, aturan prosedur, kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya. *Multicultural education* hakikatnya juga merupakan upaya melembagakan filsafat pluralisme budaya dalam sistem pendidikan dengan membumikan prinsip persamaan, saling menghargai, menerima dan memahami serta adanya komitmen moral terhadap keadilan sosial. Definisi ini dapat dibaca dalam Geneva Gay, "A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education" dalam *Urban Education Monograph Series*, (Washington, NCREL's Urban Education Program, 1994), p. 2.

² Muhamad Ali, "Pendidikan Pluralis-Multikultural" dalam *Kompas*, 26 April 2002.

dengan sejumlah upaya secara sungguh-sungguh dan kontinyu untuk memformulasikannya ke dalam gagasan yang lebih aplikatif. Bahkan dapat dikatakan, upaya mempromosikan konsep pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik horisontal maupun vertikal bangsa akibat salah paham soal SARA belum berjalan secara signifikan. Sebaliknya, para elite politik dan elite agama, atau pakar ilmu sosial dalam menganalisa akar persoalan konflik cenderung menjadikan kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai kambing hitam. Amat sedikit yang mau mengakui kalau persoalan konflik dan kekerasan itu amat berkait erat dengan praktik pengajaran (pendidikan) agama dan moral yang belum memupuk kerukunan bersama.

Sebagai implikasinya, upaya-upaya memperlunak kebekuan dan mencairkan kekakuan pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dari masing-masing agama dan budaya belum dianggap terlalu penting untuk digiring ke ranah pendidikan. Mulai dari segi materi sampai metodologi yang diajarkan di sekolah, pesantren, seminari, dan masyarakat umumnya, memiliki kecenderungan untuk mengajarkan pendidikan agama secara parsial (kulitnya saja). Materi pendidikan agama misalnya lebih terfokus pada mengurus masalah *private affairs (al ahwal al syakhsiah)* semacam masalah keyakinan seorang hamba dengan Tuhannya *face to face*. Seakan masalah surga atau kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan ibadah atau akidah saja. Sebaliknya, pendidikan keagamaan kurang peduli dengan isu-isu umum (*al-ahwal al-umamah*) semacam sikap antikorupsi, wajibnya transformasi sosial, dan kepedulian terhadap sesama.³

Fenomena di atas tentu saja patut disesalkan. Pasalnya, saat ini konsep pendidikan multikulturalisme yang berintikan penekanan upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lain di kalangan peserta didik sangat dibutuhkan. Alasannya, kondisi-situasi bangsa saat ini belum benar-benar steril dari ancaman konflik etnis dan agama, radikalisme agama, separatisme, dan disintegrasi bangsa. Bahkan dapat dikatakan, serangkaian kerusuhan yang memakan ribuan korban tewas seperti kasus Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997), Ambon dan Maluku sejak 1999, sampai Sampit, Kalimantan Timur (2000) sewaktu-waktu bisa meledak jika tanpa langkah antisipatif secara dini. Untuk itu, menghadirkan konsep pendidikan multikultural merupakan bagian dari usaha komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi konflik bernuansa SARA.

Konsep yang Mengakar

Jika ditelaah, konsep multikulturalisme sebenarnya relatif baru dibandingkan konsep pluralitas (*plurality*) maupun keragaman (*diversity*). Menurut Bhikhu Parekh (Gurpreet Mahajan, *Democracy, Difference and Justice*, 1998), baru sekitar tahun 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya.⁴ Selain itu ketiganya memiliki perbedaan titik tekan. Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Sedangkan multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik sehingga

³ Busman Edyar, "RUU Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, 31 Maret 2003.

⁴ Mun'im A Sirry, "Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme", dalam *Kompas*, 1 Mei 2003.

dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Wacana multikulturalisme untuk konteks Indonesia mulai mengemuka ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik menjadi lemah dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, keadaan negara menjadi kacau-balau dengan berbagai konflik antarsuku bangsa dan antargolongan, menimbulkan keterkejutan dan kengerian para anggota masyarakat. Keadaan demikian lantas membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem nasional macam apa yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah ini, sistem apa yang bisa membuat suku-suku bangsa dan golongan hidup damai dengan meminimalkan potensi konflik.

Kebutuhan untuk mencari konsep baru dalam menata masyarakat yang majemuk ini di antaranya mengilhami Perhimpunan Indonesia Baru dan Asosiasi Antropologi untuk menggelar seminar bertajuk *Menuju Indonesia Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural* di Jogjakarta pada pertengahan Agustus 2001.⁵ Para peserta bersepakat bahwa landasan budaya masyarakat Indonesia yang bercorak masyarakat majemuk sudah saatnya dikaji kembali. Masyarakat multikultural adalah bentuk yang dirasa mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Multikulturalisme, tegas Sosiolog UI Parsudi Suparlan dalam seminar itu, adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. Parsudi melihat bahwa multikulturalisme merupakan pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan-perbedaan itu terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Sedang kesukubangsaan dan masyarakat suku bangsa dengan kebudayaan suku bangsanya tetap dapat hidup dalam ruang lingkup atau suasana kesukubangsannya.

Di sisi lain, munculnya konsep multikulturalisme juga sesuai dengan tuntutan era reformasi. Datangnya era reformasi telah membuka jalan bagi bagi rakyat Indonesia untuk membentuk Indonesia Baru. Konsep Indonesia Baru pada hakekatnya adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang demokratis yang ditandai dengan berjalannya penegakan hukum untuk supremasi keadilan, terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat serta terwujudnya kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Secara sederhana, bangunan Indonesia Baru yang diharapkan lahir dari reformasi adalah "masyarakat multikultural Indonesia" atau masyarakat Indonesia berideologi multikulturalisme yang berdirikan: rela dan sadar mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁶ Berpijak pada prinsip multikulturalisme ini, masyarakat Indonesia pada hakekatnya mengakui dan menerima sebuah konstruk kebudayaan yang berlaku umum atau bercorak seperti sebuah

⁵ *Kompas*, 3 September 2001.

⁶ Parsudi Suparlan. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Artikel CMDD*, (Jakarta, CMDD Online), p. 1. http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm.

mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar.

Prinsip multikulturalisme ini sebenarnya telah menjadi acuan bagi pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".⁷

Oleh karena itu, prinsip multikulturalisme dapat dijadikan sebagai strategi dan pendekatan dalam merajut hubungan antara warga yang belakangan ini mudah terbawa dalam suasana yang penuh konflik sebagai efek samping dari era keterbukaan. Multikulturalisme juga dipakai sebagai perangkat analisa atau perspektif guna memahami dinamika keanekaragaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku, bangsa, rasial, golongan, dan agama.

Sebagai strategi dari integrasi sosial maka multikulturalisme mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Hal ini membawa implikasi dalam bersikap bahwa realitas sosial yang sangat polimorfik atau majemuk tak akan menjadi kendala dalam membangun pola hubungan sosial antarindividu penuh toleransi. Bahkan, akan tumbuh sikap yang dapat menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya.⁸ Sehingga, dapat ditegaskan bahwa multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan.

Dalam konstelasi perpolitikan nasional, multikulturalisme direkonstruksi oleh sekelompok ilmuwan sebagai hasil koreksi terhadap kegagalan rezim Orde Baru dalam mengelola masyarakat yang multi-etnik ini.⁹ Orde Baru saat itu cenderung menerapkan pendekatan asimilasionisme dan pendekatan diferensialisme dalam mengelola dalam perbedaan etnis, kultur, agama dan lain-lain.¹⁰ Pendekatan asimilasionisme menganggap etnik minoritas akan sepenuhnya membaaur ke dalam masyarakat mayoritas (dan negara) dengan melakukan tindakan "perubahan individual", yang seringkali berupa pengorbanan individu untuk tidak lagi menjalankan berbagai kebiasaan, kepercayaan, dan berbagai aktivitas sosio-kultural yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas etniknya. Dengan cara ini diperkirakan elemen perbedaan bisa diminimalkan dan konflik bisa dihindari. Berpijak pada model ini, peran negara di tingkat kebijakan maupun kelembagaan seringkali terbatas karena perubahan ke arah apa yang dinamakan sebagai "pembauran" tadi telah dialihkan menjadi tanggung jawab individual.

⁷ *Ibid.*

⁸ Agus Subagyo, "Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global", dalam *Kompas*, 28 Desember 2001

⁹ Di antaranya datang dari 400 ilmuwan independen yang diprakarsai oleh Nurcholish Madjid, Emil Salim dan kawan-kawan. Mereka berkumpul di Bali untuk mencari solusi terhadap masalah keterpurukan total negara kita. Forum ini merekomendasikan perlunya penerapan pendidikan multikultural untuk menangkal primordialisme yang meningkat di tanah air. Baca ⁹. Conny Semiawan, Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural" dalam *Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakan HAM*, (Ditjen HAM, 14 September 2003), p. 10.

¹⁰ *Kompas*, 14 Maret 2001.

Di sisi lain, Orde Baru pada waktu itu juga menggunakan pendekatan diferensialisme dalam mengelola masyarakat. Dengan pendekatan ini, mereka beranggapan bahwa konflik etnis bisa dihindari dengan menghapus atau mengurangi kontak antara masyarakat mayoritas dan kelompok etnik minoritas. Ekstrem dari pendekatan ini adalah praktik politik *apartheid* seperti dijalankan dalam kebijakan Pemerintah Afrika Selatan sebelum Presiden Mandela berkuasa. Atau bisa juga berupa pemusnahan etnis minoritas, dengan cara paling halus sampai yang paling kasar, seperti terjadi di beberapa negara Amerika Latin.¹¹

Kelemahan dari pelaksanaan pendekatan asimilasionisme dan diferensialisme tentu memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk merekonstruksi pendekatan baru yang lebih apresiatif dan empatik terhadap perbedaan kultur masyarakat Indonesia. Pendekatan baru ini kemudian terkenal dengan sebutan multikulturalisme. Prinsip multikulturalisme mengajarkan untuk mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnis. Berangkat dari prinsip demikian, maka individu maupun kelompok dari berbagai etnik dalam pandangan ini, bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas etnis dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat. Sehingga, keberagaman budaya ada di belakang, di depan dan di sekeliling kita bisa memberikan sumbangannya yang paling berharga bagi semua orang. Jadi, paradigma multikulturalisme pada prinsipnya mengajarkan kepada kita untuk memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain (*the others*).

Oleh karena itu, untuk menerapkan multikulturalisme agaknya menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Bisa diibaratkan, keanekaragaman budaya ini bagai bintang-bintang di langit yang bertebaran bak mutiara menghiasi jagat raya.¹² Konsekuensinya, peranan negara pada konteks ini hanya memfasilitasi bagi terciptanya toleransi antar-entitas sosial budaya, dan bukan memainkan peran intervensi-represif yang dapat menimbulkan resistensi dan radikalisme kultural sebagaimana terjadi pada rezim korporatis Orde Baru. Diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya hingga orientasi politik akan bisa mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di belakang hari.

Implementasi Konsep Multikulturalisme dalam Dunia Pendidikan

Uraian sebelumnya telah mempertebal asumsi bahwa betapa paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara beragamnya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan yang lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai dan keperibadiannya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² Parsudi Suparlan. "Menuju Masyarakat Indonesia..." p. 1.

menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan maka seyogyanya semua pihak mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan serta jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal itu, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.¹³

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan (*l'intorelable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturun Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktek diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an.¹⁴ Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multikultural.

Tahun 1980-an agaknya yang dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank, adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan.¹⁵ Pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an, muncul kelompok sarjana di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka

¹³ UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003).

¹⁴ Paul Gorski, *Multicultural Philosophy Series, Part 1: A Brief History of Multicultural Education*, (The McGraw-Hill Companies, 2003), p. 1.

¹⁵ *Ibid*, p. 3.

kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi sosial dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an.¹⁶ Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.¹⁷

Dalam konteks keindonesiaan, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hampasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.¹⁸

Secara generik, pendidikan multikultural memang merupakan sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.¹⁹

Menurut James A. Banks, tujuan pendidikan multikultural dirumuskan sebagai berikut:

“The goal of multicultural education is an education for freedom. . . . Multicultural education should help students to develop the knowledge, attitudes, and skills to participate in a democratic and free society. . . . Multicultural education promotes the

¹⁶ Cameron McCarthy, “Multicultural Discourses and Curriculum Reform: A Critical Perspective” dalam *Journal Winter Online*, (Illinois, University of Illinois, 1994, Number 1 Volume 44), p. 1.

¹⁷ William H. Watkins, “Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry” dalam *Journal Winter Online*, (Illinois, University of Illinois, 1994, Number 1 Volume 44), p. 9.

¹⁸ Conny Semiawan, “Memelihara Integrasi . . .,” p. 10.

¹⁹ Banks, J. A. (1997b). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.), *Multicultural education: Issues and perspectives* (3rd ed., pp. 385-407). Boston: Allyn and Bacon, p. xi.

freedom, abilities and skills to cross ethnic and cultural boundaries to participation in other cultures and groups.²⁰

Artinya:

“Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis agar dapat berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain”.

Masih menurut James A. Banks, substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as education for freedom*) sekaligus sebagai penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (*as inclusive and cementing movement*). Jadi, pendidikan multikultural bersifat antirasial, mendasar, penting (berguna) untuk semua siswa, pervasif, untuk keadilan sosial serta merupakan sebuah proses dan pedagogi kritis.

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan. *Pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan negara lain. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan dan budaya yang kadang-kadang bertentangan, menyangkut sebuah peristiwa, nilai dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespon isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang.²¹

Singkatnya, paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egoistik, individualistik dan eksklusif di kalangan anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras, agama, budaya dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu para siswa dalam mengembangkan proses identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Pengenalan kebudayaan artinya anak dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan dan sekolah. Pengenalan suku bangsa artinya anak dilatih untuk bisa hidup sesuai kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya. Sementara lewat pengenalan secara global diharapkan siswa memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka bisa mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang dia hadapi.²²

²⁰ Rose Reissman, “The Evolving Multicultural Classroom” dalam *ASCD Publication*, (New York, 1994, ASCD), p. 3.

²¹ Donna M. Gollnick dan Philip C Chinn, *Multicultural Education for Exceptional Children. E*, (IC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA, Mei, 1991), p. 6.

²² Rose Reissman, “The Evolving Multicultural ...,” p. 3.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini.

- pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.

- Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.

- Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.

- Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.²³ Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.²⁴

Bisa digarisbawahi bahwa nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif, bukan sikap yang spontan (*La tolerance est une position civique active, et non pas une attitude spontanee*, Fernando Savater), maka sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar menginternalisasikannya.²⁵ Toleransi harus dididikkan, tidak cukup berhenti pada wacana. Keputusan majelis ulama, keputusan konsili, kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, dan kesepakatan hasil pertemuan tokoh agama yang menganjurkan toleransi tidak akan cukup efektif bila hanya berhenti di kertas dan bibir, tanpa dukungan pendidikan dalam arti luas.

Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih multikultural maka pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh pluralisme dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi dan dominasi sosial. Pada konteks ini tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstra-kurikuler, dan peran guru menjadi multikultural. Menurut Gay's, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas dan bersifat komprehensif dan mencakup semua level pendidikan.²⁶

²³ Mack, C., Jr. (July–August 1992). "Mistaken Identity and Issues in Multicultural Education." *Updating School Board Policies* 23, 6: 1–4.

²⁴ Jennifer Romanowski, "Exploring My Practicum Community A Critical Analysis of Multicultural Education Initiatives" in the Winning Paper, (Nipissing University, 2002), p. 2.

²⁵ Muhammad Ali, "Pendidikan Pluralis..."

²⁶ Francisco Hidalgo, *Multicultural Education Landscape for Reform in Twenty First Century* (New Mexico, New Mexico State University, September 11, 2003), p. 51.

Jadi, isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain.²⁷ Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan perlu memasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Jika memberi contoh ilmuwan dan hasil teknologi, ia perlu juga mengambil berbagai budaya dan latar belakang budaya masing-masing termasuk jender. Kesamaan dan perbedaan antar budaya perlu dijelaskan dan dimengerti. Siswa dibantu untuk kian mengerti nilai budaya lain, menerima dan menghargainya. Misalnya, dalam mengajarkan makanan, pakaian, cara hidup, bukan hanya dijelaskan dari budayanya sendiri, tetapi juga yang lain.

Sebagai pengenalan konsep keragaman budaya dan tujuan pendidikan multikultural di kalangan sekolah menengah, seorang pendidik bisa menggunakan sebuah alat peraga visual berupa payung. Sebut saja payung itu bernama “Payung Multikultural” (*The Multicultural Umbrella*) yang pada tiap-tiap ruas bagian luar payung ditulisi berbagai etnis, ras, agama, budaya, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan/keadaan khusus seperti anak-anak terlantar, orang-orang cacat, penderita AIDS dan lain-lain.²⁸

Seorang pendidik bisa menggunakan “Payung Multikultural” dalam membantu anak didik untuk memahami keterlibatan banyak kelompok dan keinginan di masyarakat. Caranya, anak didik di kelas diberi waktu 5-10 menit untuk menyusun daftar anggota kelompoknya. Tiap-tiap kelompok membacakan apa yang tertulis di ruas payung yang dihadapinya. Setelah itu kelompok lain disuruh untuk memberikan reaksi, refleksi dan tanggapan. Jika anak didik bisa menarik pemahaman terhadap payung multikultural tersebut diyakini akan dapat menumbuhkan sensitifitas multikultural mereka yakni sebuah kesadaran bahwa aneka ragam ras, etnis, agama, kebudayaan dan kelompok kepentingan yang dihadapinya tak akan menghalangi mereka untuk hidup berdampingan secara damai, rukun dan kohesif.

Singkatnya, paradigma pendidikan multikultural perlu mewarnai model pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Model pembelajaran multikultural tersebut menggunakan berbagai pendekatan berbeda-beda. Misalnya, seorang guru menyajikan bahan termasuk dalam memberi contoh, dia dituntut memilih yang beraneka nilai. Di samping itu, buku-buku yang ditulis dalam pelajaran pun perlu disusun untuk menghargai budaya lain dan penghargaan jender.

Sesuai prinsip pendidikan multikultural, maka aktivitas pembelajaran di sekolah disarankan untuk memberi perhatian pada kompleksitas dinamis dari berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi manusia, seperti fisik, mental, kemampuan, kelas, jender, usia, politik, agama, dan etnisitas. Untuk itu, langkah-langkah yang ditempuh untuk mengembangkan model pembelajaran multikultural sebagai berikut: (1) Guru mereduksi atau mengikis sikap negatif yang mungkin mereka miliki terhadap pluralisme sosial, keagamaan, dan etnis. (2) Seorang pendidik dan anak didik melakukan analisa terhadap situasi agar akrab dengan masyarakat. (3) Seorang pendidik dan anak didik memilih materi yang relevan dan sekaligus menarik. (4) Seorang pendidik dan anak didik, bersama-sama, menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan materi yang dipilih. Dalam hal ini, disarankan

²⁷ Paul Suparno, “Pendidikan Multikultural” dalam *Kompas*, 7 Januari 2003.

²⁸ Rose Reissman, “The Evolving Multicultural ...,” p. 12.

mengidentifikasi persoalan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, kehidupan ekonomi, kemampuan, mental serta fisik.

Atas dasar ini maka pendidikan multikultural sangat menekankan orientasi proses pendidikan pada siswa atau komunitas tertentu, yang memungkinkan guru memahami keyakinan serta nilai-nilai sosio-budaya siswa dalam konteks kebudayaan masyarakat ketika merancang model pembelajarannya. Para pendidik dalam konteks ini disarankan menggunakan metode-metode yang bersifat antropologis untuk mengidentifikasi kelompok sosio-budaya, nilai-nilai serta praktiknya yang mempengaruhi proses berkaryanya. Pendekatan itu juga menyarankan, pentingnya mengidentifikasi penggunaan pendidikan yang tanggap budaya, yang secara lebih tegas dapat menunjukkan perbedaan etnik dan sosio-budaya di kelas, masyarakat, dan nasional.²⁹

Jika konsisten berpegang pada paradigma pendidikan multikultural, maka seorang pendidik dituntut untuk mau dan mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif (*cooperative teaching strategies*) dalam pergaulan sosial dengan para siswa yang memiliki berbagai sifat yang beragam serta bisa menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan. Sebuah proses pembelajaran dikatakan menggunakan *cooperative learning* jika bercirikan lima unsur berikut. *Pertama*, adanya *positive interdependence* (saling ketergantungan secara positif). Anggota kelompok menjalankan peran sebagai pembahas sebuah topik diskusi, penanggap dan pendukung hingga mencapai konsensus. *Kedua*, adanya *face-to-face promotive interaction* (interaksi tatap muka yang membangun). Para siswa berdiskusi, mengajar dan menjelaskan kepada siswa lain dengan cara membangun seperti memberikan dorongan, *support* dan saling membantu siswa dalam belajar. *Ketiga*, adanya *individual accountability* (pertanggungjawaban secara individual). Para siswa dinilai secara individual. Langkah ini untuk meyakinkan bahwa masing-masing anak telah bekerja sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tugasnya. *Keempat*, *social skills* (keterampilan sosial). Para siswa harus mempelajari keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam bekerja dengan yang lain seperti kepemimpinan, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi dan keterampilan memajemen konflik. *Kelima*, *groups process their effectiveness*. Masing-masing kelompok mendiskusikan kemajuan mereka dan memberikan masukan sehingga masing-masing bisa meningkatkan diri.³⁰

Dengan *cooperative learning* akan mendorong anak saling belajar segi-segi positif dari temannya. Pada gilirannya, mereka terkondisikan dengan proses pembelajaran di mana seorang siswa belajar bersama siswa lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami.³¹ Dalam proses pembelajaran demikian, tentu saja akan dapat menanamkan dan melatih nilai-nilai baru (*co-creating new values*) pada diri anak didik sehingga nantinya mereka memiliki spirit multikultural berupa mau hidup rukun dan damai dalam suasana kemajemukan. Itu artinya, akan terjadi perubahan cara berpikir (*intellectual mindshift*) dari sebelumnya yang bercara pandang dan interpretasi sosial-budaya sempit dan fanatis terhadap budaya mereka sendiri (*microculture*) berubah

²⁹ Tjetjep Rohendi Rohidi, "Pendidikan Seni Multikultural" dalam *Kompas*, 23 September 2002.

³⁰ Donna J. Martin et.al, "Issues of Feminism and Multicultural Education for Educational Technology" dalam *Instructional Technology on Line*, (Athens, The University of Georgia, 2003), p. 18. <http://itech1.coe.uga.edu/itforum/paper38/paper38.html>

³¹ Conny Semiawan, "Memelihara Integrasi Sosial," p. 1.

menjadi cara pandang dan interpretasi demokratis-pluralis dan mampu menghargai budaya orang lain.

Penutup

Pada akhirnya, bisa tidaknya wacana pendidikan multikulturalisme diterapkan oleh lembaga pendidikan tergantung pada ikhtiar kita bersama. Pada konteks ini, Depdiknas R.I agaknya sebagai pihak yang pantas ditunggu peran aktifnya. Setidak-tidaknya Depdiknas R.I mau mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar suku bangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya. Jika ide pelajaran multikulturalisme jadi dilaksanakan di sekolah-sekolah, maka akan bisa menjadi antisipasi dalam mencegah munculnya konflik berdarah antar suku bangsa.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Muhammad, "Pendidikan Pluralis-Multikultural" dalam *Kompas*, 26 April 2002).
- Banks, J. A., "Multicultural education: Characteristics and goals" In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.) *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, Boston, Allyn and Bacon, 1997.
- Edyar, Busman, "RUU Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, 31 Maret 2003.
- Gay, Geneva, "A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education" dalam *Urban Education Monograph Series*, Washington, NCREL's Urban Education Program, 1994.
- Gollnick Donna, M dan Philip C Chinn, *Multicultural Education for Exceptional Children. E*, (IC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA, Mei, 1991.
- Gorski, Paul, "Multicultural Philosophy Series, Part 1:A Brief History of Multicultural Education" dalam *The McGraw Hill Education Papers online*, The McGraw-Hill Companies, 2003.
- Hidalgo, Francisco, *Multicultural Education Landscape for Reform in Twenty First Century*, New Mexico, New Mexico State University, September 11, 2003.
- Mack, C., Jr. (July–August 1992). "Mistaken Identity and Issues in Multicultural Education." *Updating School Board Policies* 23.
- Martin, Donna, J, et.all, "Issues of Feminism and Multicultural Education for Educational Technology" dalam *Instructional Technology online*, Athens, The University of Georgia, 2003. <http://itech1.coe.uga.edu/itforum/paper38/paper38.html>
- McCarthy, Cameron, "Multicultural Discourses and Curriculum Reform: A Critical Perspective" dalam *Journal Winter Online*, Illinois, University of Illinois, 1994, Number 1 Volume 44.
- Reissman, Rose, "The Evolving Multicultural Classroom" dalam *ASCD Publication*, New York, 1994, ASCD.

- Rohendi, Rohendi, Tjetjep, “Pendidikan Seni Multikultural” dalam *Kompas*, 23 September 2002.
- Romanowski, Jennifer, , “ Exploring My Practicum Community: A Critical Analysis of Multicultural Education Initiatives” in the Winning Paper, Nipissing University, 2002.
- Semiawan, Conny, Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural” dalam *Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakkan HAM*, Ditjen HAM, 14 September 2003.
- Sirry, Mun'im, A “Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme”, dalam *Kompas*, 1 Mei 2003.
- Soekarnoputri, Megawati, *UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003.
- Subagyo, Agus, “Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global”, dalam *Kompas*, 28 Desember 2001.
- Suparlan, Parsudi, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural” dalam *Artikel CMDD*, (Jakarta, CMDD Online), p. 1. [http:// www. scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm)
- Suparno, Paul, “Pendidikan Multikultural” dalam *Kompas*, , 7 Januari 2003.
- Watkins, William, H, “Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry” dalam *Journal Winter Online*, Illinois, University of Illinois, 1994, Number 1 Volume 44.

Zubaedi M. Ag M. Pd adalah Peserta Program Doktor Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

